

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang mengatur pelayanan dan kelembagaan sosial untuk membantu individu dan kelompok mencapai kehidupan yang bermartabat dan derajat kesehatan dengan tujuan memelihara hubungan sosial yang setara antar individu sesuai dengan potensi pertumbuhannya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut kelurahan. kebutuhan Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup dan berkembang secara memadai untuk memenuhi kewajiban sosialnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kebutuhan dasar di kehidupan sehari-hari dan terhindar dari kesusahan. Keadaan sejahtera itu mencakup kondisi dimana kehidupannya terpenuhi secara jasmani, rohani, dan sosialnya. Jika seseorang dapat menjalankan kehidupan dan kebutuhannya secara mandiri dan terpenuhinya kebutuhannya dengan baik, maka dapat dikatakan orang tersebut berada kondisi sejahtera. Namun jika salah satu diantaranya tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan sejahtera dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosialnya, dalam hal ini tentu ada upaya untuk mencapai sejahtera.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Muhidin sebagai berikut:

Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, Kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan masyarakat. (Muhidin,1984 dalam Kholis, 2019)

Kesejahteraan sosial dapat dijelaskan sebagai suatu keperluan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan seseorang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial menjadi syarat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehingga individu dapat menjalankan kewajiban sosialnya dalam masyarakat dengan normal. Meskipun konsep bantuan sosial dapat memiliki berbagai interpretasi, namun paling tidak dapat disusun dalam kerangka penelitian akademik dan lembaga sosial dalam konteks sistem negara. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diartikan sebagai peran negara dalam menyediakan layanan sosial kepada warganya, sehingga fungsi sosial dan keutuhan masyarakat dapat dipertahankan secara optimal.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama untuk mencapai standar kehidupan individu, kelompok, ataupun masyarakat berdasarkan konteks sosial. Hal tersebut meliputi kebutuhan-

kebutuhan pokok, serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan Masyarakat di sekitarnya.

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2012).

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982 dalam Fahrudin, 2014: 12).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2012:12).

2.2 Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu orang lain, semata-mata ingin membantu orang lain untuk menjadi lebih baik dari kondisikondisi sebelumnya yang dianggap kurang baik. Pengertian pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh the Council on Social Work Education dalam tahun 1959 dalam Fahrudin (2012: 59) dinyatakan bahwa:

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatankegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pecegahan disfungsi sosial. (Fahrudin, 2012: 59).

Kesimpulan diatas yaitu pekerjaan sosial bertujuan membantu individu-individu dalam memperbaiki fungsi sosial mereka melalui kegiatan yang melibatkan interaksi sosial. Hal ini bertujuan agar hubungan sosial mereka dapat terjalin harmonis di dalam lingkungan tempat individu tersebut berada. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan interaksi sosial ini bertujuan membantu individu menciptakan hubungan sosial baru, mengatasi gangguan hubungan yang disebabkan oleh kurangnya interaksi atau faktor lain, dan mencegah berbagai kondisi disfungsi sosial. Sebagai contoh, dalam suatu keluarga, pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi

kondisi di mana seorang ayah yang seharusnya mencari nafkah namun menjadi pengangguran karena kurangnya keterampilan yang dimilikinya.

Pekerjaan sosial yang memiliki kemampuan untuk membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah menjadikan tugas sebagai pekerjaan sosial bertambah berat, namun dengan kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan seorang pekerjaan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya.

Pengertian pekerjaan sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011: 39) bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang lain dan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan kehidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial. (Soetarso dalam Huraerah, 2011: 39).

Soetarso mengemukakan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dengan memberikan bantuan melalui pengembangan-pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

2.2.1 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan utama yang harus dilakukan oleh seorang pekerjaan sosial ini guna mengembalikan keberfungsian sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok serta masyarakat dalam mencapai suatu derajat kehidupan yang lebih baik.

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2012: 66) bahwa:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (NASW dalam Zastrow, 2008).

Empat tujuan dalam praktek pekerjaan sosial menurut NASW di atas, bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih jelas dan terarah pada pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktek-praktek pekerjaan sosial dan proses pertolongannya kepada inividu maupun masyarakat, sehingga proses pertolongan yang diberikan tidak sekedar membantu masyarakat yang memiliki masalah sosial, tetapi memang pertolongan tersebut sesuai dengan prosedur praktek pekerjaan sosial. Selain keempat tujuan itu, menurut Zastrow 2008 juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE dalam Fahrudin (2012: 67) menyatakan bahwa:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam. (CSWE dalam Fahrudin, 2012: 67)

CSWE bahwa tujuan praktek pekerjaan sosial tidak cukup hanya empat tujuan, tetapi juga perlunya pengembangan dari seorang pekerjaan sosial itu sendiri untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan dalam praktek pekerjaan sosial dalam menangani berbagai macam kasus-kasus yang dialami kliennya. Sehingga pekerjaan sosial juga memiliki kualitas yang baik untuk meningkatkan kualitas orang lain dalam mencapai suatu kondisi yang sejahtera.

2.2.2 Fungsi Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial merupakan jenis layanan profesional yang diberikan oleh pekerja sosial untuk membantu individu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga keberfungsian sosial mereka dapat pulih. Perbedaan pekerjaan sosial dengan profesi lain terletak pada tugas-tugas khusus yang diemban oleh pekerjaan sosial. Sebagai profesi profesional, pekerjaan sosial menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, dan tujuannya adalah membantu

individu mengembalikan keberfungsian sosial mereka, sehingga hal ini menjadi pembeda yang signifikan dengan profesi lainnya.

Iskandar (2013: 30) fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
- b. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga, yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 1. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu maupun kelompok,
 2. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,
 3. Mencegah timbulnya kesengsaraan dan mengatasi kemelaratan individu,
 4. Melindungi individu maupun keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Iskandar bahwa fungsi di dalam praktek pekerjaan sosial ini guna mengembangkan dan menjamin kesejahteraan sosial bagi individu maupun kelompok. Fungsi-fungsi tersebut perlu diterapkan oleh pekerjaan sosial agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat pekerjaan sosial melaksanakan tugas-tugas profesinya, sehingga tujuan dan fungsi dari pekerjaan sosial dapat terlaksana dengan baik dan fokus pekerjaan sosial dalam membantu individu dan kelompokpun dapat tercapai.

Fungsi lain tentang pekerja sosial juga dikemukakan oleh Sukoco (1995: 20) bahwa:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber.
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial.
- e. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Fungsi pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Sukoco menyangkut lima hal, dimana pekerja sosial ini memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masing-masing individu guna

meningkatkan kemampuan yang mereka miliki untuk memecahkan masalah yang mereka alami, membantu mereka dalam hal berinteraksi sosial dengan sistem sumber seperti pemerintah desa atau kabupaten, lembaga-lembaga sosial yang memberikan berbagai macam pelayanan serta para pemilik dunia usaha untuk dapat bekerja sama dalam hal meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan agar pemerataan pembangunan baik itu ekonomi maupun sosial dapat tersebar diberbagai daerah secara merata.

2.2.3 Peran Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial sebagai seorang pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995: 22-27) bahwa:

- a. Sebagai pemercepat perubahan (*Enabler*) Sebagai *Enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
- b. Peran sebagai perantara (*Broker*) Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*Educator*) Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*Expert*) Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat).
- e. Perencana sosial (*Social Planner*) Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

- f. Fasilitator Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Sukoco mengemukakan tentang peran - peran pekerja sosial yang terdiri dari tujuh peranan yang seluruhnya harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan pertolongan kepada individu, kelompok maupun masyarakat guna memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan membantu mereka agar dapat hidup secara mandiri. Seiring dengan tujuh peranan yang harus diemban oleh pekerja sosial, tentu hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan juga perlunya koordinasi antara pekerja sosial dengan pemerintah, dinas sosial, lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat mencapai tujuan mereka serta meringankan beban dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

Peranan pekejaan sosial juga sejalan dengan yang ditulis menurut Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa:

- a. *Enabler* : Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.
- b. *Broker* : Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.
- c. *Expert* : Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.
- d. *Social Planner* : Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.
- e. *Advocat* : Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer /community worker* melaksanakan fungsinya sebagai advocate yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.
- f. *The Activist* : Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*Disadvantage Group*).

Zastrow mengemukakan pendapat mengenai peran-peran pekerjaan sosial di atas bahwa peran pekerjaan sosial terbagi menjadi tujuh, dimana setiap peranan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial memiliki fokus untuk membantu individu dan masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang beruntung, baik itu dalam pemberian pelayanan sosial yang tidak merata, kebutuhan material dan non material serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Tujuh peranan yang diemban oleh pekerjaan sosial dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat ini guna meningkatkan keberfungsian sosialnya, dimana peran pekerjaan sosial dalam advocate dan sebagai activist ini sangat membantu masyarakat yang kurang beruntung apabila masyarakat tersebut dirugikan oleh pihak-pihak yang mengancam keberadaan masyarakat yang kurang beruntung yang dapat mengganggu kehidupan dilingkungan sosial mereka.

2.2.4 Unsur – unsur Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai unsur profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur diantaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi jika kita teliti lebih jauh, sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahuan terlepas dari individu. Sikap adalah kecenderungan yang relatif bertahan lama dari seorang individu untuk mengamati, merasakan, berfikir, dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu objek tertentu (Komorita, Neel, & Wagman, 1962) dalam (Fahrudin, 2018).

Hepworth, Rooney, dan Larsen (2002) juga menyatakan bahwa unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial dimanapun dipraktikkan adalah sebagai berikut:

1. Maksud/tujuan profesi itu
2. Nilai-nilai dan etika
3. Dasar pengetahuan praktik langsung
4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan

Ketika seseorang mengikuti program pendidikan di bidang pekerjaan sosial, mereka akan mendalami pengetahuan, nilai-nilai, etika, metode, dan teknik pekerjaan sosial yang diajarkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Dengan merujuk pada pengetahuan yang diperoleh dan dipandu oleh nilai-nilai yang dianutnya, individu tersebut dapat mengaplikasikan keterampilan pekerjaan sosialnya untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipelajarinya.

2.2.5 Tahap - tahap Intervensi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu atau menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga mereka nantinya mampu mencari jalan sendiri. Berkaitan dengan proses intervensi pekerjaan sosial tersebut, menurut Max Siporin yang dikutip oleh Iskandar (2013:65) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap *Engagement Intake* dan kontrak Bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan untuk klien dalam pemecahan masalah, lalu akan terjadi saling mengenal dan kemudian terciptalah kontrak.
- b. Tahap *Assesment* Merupakan proses penggalian dan pemahaman masalah yang dihadapi klien. Dengan demikian akan terlihat bentuk masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah.
- c. Tahap *Planning* Rencana proses penyusunan pemecahan masalah yang dihadapi klien. Rencana tersebut meliputi tujuan pemecahan masalah, sasaran serta cara memecahkan masalah.
- d. Tahap *Intervention* Tahap pelaksanaan pemecahan masalah, dalam pelaksanaan kegiatan ini klien diharapkan mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.
- e. Tahap evaluasi Merupakan tahap pengevaluasian terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan, hambatan yang dialami oleh klien.
- f. Tahap terminasi Merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakuakn bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor – faktor tertentu.

2.3 Pekerja Sosial

Pengertian Pekerja Sosial Menurut (Chechak, 2015) menyatakan bahwa Pekerja sosial merupakan bidang keahlian. Pekerja sosial memiliki kewenangan untuk melaksanakan

pelbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya melalui interaksi, agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan, Keikhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pekerjaan sosial adalah ilmu terapan yang memiliki tujuan untuk perubahan atau menghasilkan tindakan, bukan sekedar untuk memahami fenomena social (Barsky, 2010).

Pekerja sosial menjadi pekerja yang mempunyai kualifikasi yang mumpuni sehingga menjadikan tenaga professional yang tidak hanya bidang akademisi tetapi dilapangan juga bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pekerja sosial dilatih untuk menegakkan dan serangkaian nilai- nilai terkemuka yang berfokus pada kesetaraan sosial, hak kesejahteraan, hak asasi manusia, diskriminasi, dan penindasan (Islam & Syarif, 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pekerja sosial merupakan seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintahan atau pun swasta yang memiliki kompetensi dalam profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. (Huda, 2009). Pekerja sosial sebagai profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurniawan et al., 2019)

Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan kebijakan sosial dan aksi sosial di beberapa negara maju semakin diperluas, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan relasi kelompok minoritas (Soetji, 1967).

2.3.1 Tujuan Pekerja Sosial

Pekerja sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan:

1. Mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
2. Memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan (Saalik Hudan Alfariz et al., 2020)

2.3.2 Praktik Pekerja Sosial

Praktik pekerja sosial dilaksanakan dalam standar praktik pekerja sosial diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 meliputi:

1. Standar operasional prosedur

2. standar kompetensi pekerja sosial
3. standar layanan. Standar operasional prosedur yang dimaksud adalah sebuah tahapan proses pelayanan yang umumnya dilakukan oleh pekerja sosial (Saalik Hudan Alfariz et al., 2020)

2.3.3 Fungsi Pekerja Sosial

Standar layanan sebagaimana dimaksud dilandaskan pada fungsi praktik pekerjaan sosial. Fungsi praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Mencegah Disfungsi Sosial
2. Melaksanakan perlindungan sosial
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial
4. melaksanakan pemberdayaan sosial
5. Melaksanakan pengembangan sosial (Saalik Hudan Alfariz et al., 2020)

2.3.4 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai casework (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *Group Work* (terapi kelompok) dan *Family Therapy* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *Community Development* (pengembangan masyarakat) atau *Policy Analysis* (analisis kebijakan).

Peran pekerja sosial adalah berupaya untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi secara sosial disertai dengan penerapan kemampuan mendasar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari pekerja sosial dalam melaksanakan pendekatan terhadap kliennya.

Huda (2009) dan Suharto (2011) mengemukakan peran pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai penghubung. Pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem sumber yang diperlukan
2. Peran sebagai pemungkin. Pekerja sosial berperan sebagai konselor dengan berupaya untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terhambat
3. Peran sebagai mediator. Pekerja sosial sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik
4. Peran sebagai advokat. Pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
5. Peran sebagai perunding. Peranan ini muncul ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerja sama. Ini merupakan kolaborasi antara klien dan pekerja sosial yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
6. Peran sebagai pelindung. Pekerja sosial berusaha melindungi klien dari orang-orang yang berisiko terhadap kehidupan sosialnya
7. Peran sebagai fasilitator. Pekerja sosial membantu klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
8. Peran sebagai inisiator. Pekerja sosial memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah.
9. Peran sebagai negosiator. Peran ini ditunjukkan pada klien yang mengalami konflik dan mencari penyelesaian dengan kompromi sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Seorang negosiator berada pada salah satu yang sedang berkonflik.
10. Peran sebagai pendidik. Pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kekurangan pengetahuan dan keterampilan klien (Kurniawan et al., 2019)

2.3.5 Kode Etik Pekerja Sosial

Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu *Valere* yang artinya menjadi kuat, atau menjadi terhormat. Pada dasarnya, nilai memiliki pengertian yang berbedabeda disesuaikan dengan konteksnya. Soetarso mengatakan bahwa nilai adalah kepercayaan, pilihan, atau asumsi tentang yang baik untuk manusia. Nilai bukan menyangkut keadaan dunia ini atau apa yang diketahui pada saat ini, tetapi bagaimanakah seharusnya atau sebaiknya dunia ini. Sarah Banks mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai dapat berarti agama, politik atau prinsip-prinsip ideologi, keyakinan atau sikap. Namun, apabila dihubungkan dengan pekerjaan sosial, maka nilai yang dimaksud disini adalah seperangkat prinsip etik atau moral yang fundamental dimana pekerja sosial harus berkomitmen.

Pentingnya kode etik dalam profesi Pekerja Sosial tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas sebuah profesi juga mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu profesi tersebut juga akan berhubungan dengan manusia atau klien, jika tidak memiliki pedoman dan tidak ada kontrol sudah dapat dipastikan akan ada kecenderungan yang merugikan. Kecenderungan yang merugikan tersebut antara lain, melaksanakan praktik yang salah, berorientasi hanya kepada finansial tanpa mempertimbangkan kondisi klien, tidak memahami aturan yang berlaku mengenai hubungan dengan klien dan hubungan dengan rekan sesama Pekerja Sosial. Hal-hal ini menjadi penting, sebab sangat memungkinkan kesalahan dapat terjadi.

Ada bermacam-macam nilai dan etika dalam pekerjaan sosial. Namun, secara umum dapat dilihat dari kode etik NASW (National Association of Social Worker) antara lain:

1. Pelayanan

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial. prinsip pelayanan diletakkan diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan

golongan. Melayani klien baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat merupakan kewajiban dari pekerja sosial yang harus diutamakan. Tanpa prinsip pelayanan, pekerjaan sosial tidak memiliki aktivitas profesional. Peksos juga harus memiliki sikap penerimaan, penerimaan dalam hal ini adalah pekerja sosial harus menerima klien tanpa membeda-bedakan, menganggap semua klien sama dan tidak membeda bedakan antara satu klien dengan klien lainnya.

2. Keadilan sosial

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Tujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial. ketidakadilan sosial maupun penindasan yang terjadi dalam masyarakat menjadi tanggung jawab pekerja sosial untuk mengubah keadaan tersebut.

3. Harkat dan Martabat Seseorang

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang melibatkan diri langsung baik dalam setting individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Oleh sebab itu, setting keterlibatan langsung ini menuntut dari para peker sosial untuk memiliki modal nilai yang menghargai orang lain dalam melakukan interaksi sosial.

4. Mementingkan Hubungan Kemanusiaan

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan (human relationship) adalah unsur yang sangat penting di dalam proses perubahan sosial. maka dari itu, menjunjung tinggi hubunga kemanusiaan dan kemasyarakatan harus dilakukan untuk mendukung perubahan sosial agar berjalan secara positif. Hubungan kemanusiaan adalah bagian dari proses pertolongan.

5. Integritas

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya. Dalam batas tertentu, profesi pekerja sosial adalah seperti dokter, mengobati dan menyembuhkan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sedang sakit. Tanpa adanya perilaku yang dapat dipercaya, pekerja sosial tidak dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Integritas setidaknya ditunjukkan dengan konsistensi pekerja sosial dengan misi profesional, nilai, dan prinsip etika, dan standar etika dalam aktivitas pertolongan yang dilakukannya

6. Kompetensi

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan. Dalam hal ini pengetahuan dan skill yang memadai harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk menunjang kompetensi dari pekerja sosial. tanpa adanya kompetensi tersebut menjadikan pekerja sosial tidak dapat profesional dan mencapai tujuannya dengan baik. Sehingga adanya pengetahuan dan keahlian yang memadai juga menjadi dasar kepemilikan yang sangat penting dalam profesi pekerjaan sosial.

7. Kerahasiaan

Seorang pekerja sosial harus menjaga data dan informasi klien sehingga klien akan nyaman dan tetap percaya ketika melakukan suatu konseling dan sebagainya (Widodo, 2019).

2.4 Sekolah Luar Biasa

Sekolah luar biasa merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi orang dengan disabilitas netra, kurikulum pembelajaran di sekolah luar biasa tentunya telah dibuat dan diadaptasi sesuai kebutuhan peserta didiknya yang berkebutuhan khusus (Dermawan, 2018; Meutia Nahlisa & Christiani, 2015). Setiap anak yang

bersekolah, baik anak penyandang disabilitas maupun reguler, tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pihak sekolahnya. Begitu juga bagi orang dengan disabilitas netra yang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa pun memiliki kewajiban untuk memenuhi capaian dari pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak (Dermawan, 2018).

Sekolah luar biasa (SLB) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus atau mengalami gangguan fisik yang didalamnya terdapat proses belajar mengajar untuk menunjang mutu pendidikan yang baik sesuai kebutuhan khususnya.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya dalam pendidikan. Sehingga terciptanya pendidikan luar biasa. Tujuan dari pendidikan luar biasa adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental agar nantinya bisa kembali bersosialisasi ke masyarakat.

2.5 Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan bagian dari intervensi pekerja sosial dan berkaitan dengan pekerja sosial sehingga pengertian keberfungsian sosial menurut Fahrudin adalah: “Fungsi sosial merupakan konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep penting pekerjaan sosial” (Fahrudin 2012). Pentingnya konsep keberfungsian sosial ditekankan oleh Morales & Sheafor dengan mengatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. (Norhalim, 2019)

Sheafor & Horejsi, Konsep keberfungsian sosial merujuk kepada kapabilitas, kesempatan dan motivasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan perannya di dalam lingkungan baik secara individu, keluarga dan masyarakat dan sebagainya. (Ria, 2021)

2.5.1 Pengertian Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas – tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Fungsi sosial adalah peran untuk mencapai kesejahteraan hidup atau memperbaiki masalah kesejahteraan sosial untuk dapat melakukan tugas atau peranan sesuai dengan status kedudukannya.

Menurut Achlis (dalam Latipun, 2016) pada bukunya *Praktek Pekerjaan Sosial*, keberfungsian sosial merupakan kemampuan individu melaksanakan tugas dan perannya dalam berinteraksi dengan situasi sosial tertentu yang bertujuan mewujudkan nilai diri untuk mencapai kebutuhan hidup. Jadi keberfungsian sosial berkaitan dengan hasil interaksi orang dengan lingkungan sosial.

Keberfungsian sosial atau *social functioning* menyatakan bahwa suatu hal yang berdasarkan kesejahteraan sosial merupakan konsep penting dari pekerjaan sosial dan menjadi bidang garapan pekerjaan sosial untuk mengembalikan seseorang berfungsi lagi di dalam kehidupan sosialnya. Dubois dan Miley (dalam Savira 2021) menjelaskan bahwa keberfungsian sosial adalah upaya untuk membangun hubungan yang positif, memenuhi kebutuhan dasar, dan memprioritaskan pertumbuhan serta penyesuaian pribadi.

Siporin (dalam Fahrudin 2012) menyatakan bahwa keberfungsian sosial mengacu pada cara individu atau kolektivitas seperti keluarga, asosiasi, masyarakat dan lain-lain berperilaku agar dapat melaksanakan tugas-tugas hidup mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Manusia yang dapat berfungsi secara sosial dengan baik dan bijaksana akan menggunakan

komunikasinya dengan lingkungan dengan cara yang bermanfaat tanpa berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya dan keberfungsian sosialnya juga akan berkembang jika manusia merasa puas dengan dirinya sendiri, dan puas dengan perannya dalam kehidupan berhubungan dengan orang lain. (Savira 2021).

Keberfungsian sosial sebagai suatu kemampuan baik orang (individu, keluarga, kelompok atau Masyarakat) maupun sistem sosial (Lembaga, dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi masalah dan tekanan. (Soeharto, 2014:28)

2.5.2 Indikator Keberfungsian Sosial

Untuk melihat keberfungsian sosial, penulis menggunakan tiga indikator kemampuan, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

Maslow mengemukakan bahwa ada lima hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. (Asmadi, 2008)

2. Kemampuan dalam Melaksanakan Peran Sosial

Kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial menurut Suharto 2014, 29 adalah suatu kapasitas untuk dapat menjalankan tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya, seseorang dapat dikatakan berfungsi sosialnya apabila mampu menjalankan peranannya sesuai dengan status sosial, tugas, dan tuntutan norma lingkungan sosial.

Peran sosial adalah tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan haknya dan sesuai dengan status yang dimilikinya, sehingga timbul harapan-harapan

yang kemudian akan menantang dan berusaha untuk mencapainya dengan sarana dan kemampuan yang dimilikinya. (Abdulsyani 2012)

Kemampuan melaksanakan peran sosial adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas- tugas kehidupan sesuai dengan status sosial, tugas dan norma lingkungan sosial.

3. Kemampuan dalam Menghadapi Masalah dan Tekanan

Pemecahan masalah menurut Robert W. Balley (J. P. Purba 2012) merupakan aktivitas yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai kombinasi ide-ide cemerlang untuk membentuk kombinasi ide-ide baru, ia menekankan penalaran sebagai dasar untuk menggabungkan ide-ide dan mengarah pada pemecahan masalah. Ditambah lagi, seseorang yang memiliki banyak pengalaman di bidang tertentu selalu memiliki respon yang siap dalam suatu situasi untuk memecahkan masalah.

Proses pemecahan masalah yang dikemukakan G. Polya (1973) dalam bukunya berjudul "*How to solve it*" menjelaskan secara rinci bagaimana suatu masalah diselesaikan: (D. Purba and Lubis 2021)

- a. Memahami permasalahan
- b. Memahami hubungan antara kenyataan dan harapan
- c. Merencanakan pemecahan masalah
- d. Melaksanakan pemecahan masalah (solusi) berdasarkan rencana
- e. Memeriksa kembali atau mengevaluasi hasil dari pemecahan masalah yang telah dilakukan.

Maka, kemampuan dalam mengatasi tantangan adalah kapasitas seseorang untuk menemukan solusi melalui proses yang melibatkan pengumpulan dan pengaturan

informasi dengan maksud tertentu, dengan tujuan menemukan solusi untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi, demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2.6 Pengertian Disabilitas

Anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia. Tidak hanya ada laki-laki, perempuan, tinggi-pendek, hitam-putih, orangtua - anak, begitupun penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas. Oleh karena itu, anak penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Anak penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, pendamping, masyarakat maupun negara. Istilah disabilitas berbeda dengan istilah cacat, bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat, yang bermakna negatif dan bahkan identik dengan kata rusak atau tidak normal. (Atmaja, 2017)

Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas, yang ada adalah arti kata Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, 2019)

Istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dimiliki seseorang adalah karena hambatan fisiknya. Misalnya seorang anak yang terhambat untuk naik ke lantai dua suatu bangunan adalah karena fisiknya yang menggunakan kursi roda. Sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Misalnya tidak bisanya pengguna kursi roda naik ke lantai dua bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang dilengkapi fasilitas dengan

bidang landau/ramp atau lift. Dengan demikian, anak penyandang disabilitas tidak memiliki kendala dengan kondisi fisiknya, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel.

2.6.1 Pengertian Disabilitas Netra

Patton (dalam Wulandari, 2018) salah satu klasifikasi penyandang disabilitas adalah tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi dimana karena sesuatu hal indera penglihatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengalami keterbatasan dan/atau ketidakmampuan melihat. Tunanetra merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan penderita yang mengalami suatu kondisi dari indera penglihatannya, sehingga indera penglihatannya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Meutia Nahlisa & Christiani, 2015). Setiap orang dapat mengalami kondisi tunanetra, baik orang dewasa maupun anak-anak. Penyebab seseorang mengalami kondisi tunanetra dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akibat suatu hal sebelum kelahiran, sesuatu hal saat proses kelahiran, dan sesuatu hal pada saat setelah kelahiran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, dalam hal ini penyandang disabilitas tunanetra. Salah satu hak bagi penyandang disabilitas merupakan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, baik pendidikan yang formal maupun pendidikan untuk keterampilan pula berhak didapatkan serta dibutuhkan oleh penyandang tunanetra. Somantri (dalam Larasati & Indriana, 2017) menyatakan bahwa orang dengan disabilitas netra dibandingkan dengan anak yang memiliki penglihatan normal lebih banyak menghadapi permasalahan dalam perkembangannya.

Hambatan-hambatan tersebut muncul akibat dari ketakutan-ketakutan, seperti kurangnya motivasi, kurangnya rasa percaya diri, serta ketakutan dalam menghadapi

lingkungan sosial, yang ada didalam diri orang dengan disabilitas netra yang merasa tidak seperti anak pada umumnya. Orang dengan disabilitas netra juga dituntut untuk memenuhi tugas perkembangang yang sama dengan anak lainnya disamping keterbatasan yang dimilikinya. Dalam upaya pemenuhannya, orang dengan disabilitas netra memerlukan dukungan sosial yang lebih dibandingkan dengan anak lainnya.

Anak dengan disabilitas netra dapat dilihat pada kondisi bola mata. Individu dengan disabilitas netra mempunyai fisik mata yang berbeda dengan individu pada umumnya. Ada beberapa individu yang tidak mempunyai bola mata, kondisi bola mata yang keruh. Namun demikian ada beberapa individu yang mempunyai bola mata yang baik seperti individu lainnya akan tetapi tidak dapat melihat. Kondisi disabilitas netra terlihat ketika ia berjalan yang berbeda dengan orang kebanyakan, seperti menabrak-nabrak, kedua tangan diposisikan di depan. Pada kasus yang lain, individu dengan netra menunjukkan perilaku mendekati jarak objek dengan mata dengan jarak yang tidak lazim. Pada beberapa kasus, bahkan ketika melihat jemarinya pun dilakukan dengan cara yang sangat tidak lazim. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu tersebut mengalami kondisi keterbatasan penglihatan. (Nurakhmi et al., 2019)

2.6.2 Penyebab Disabilitas

Penyebab dari kedisabilitasan sendiri dapat berasal dari keturunan atau lingkungan, namun dapat juga dialami sejak sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Sejalan dengan pengertian diatas, Ahmadi & Supriyono (2013) (dalam Sukawati & Wulan, 2018) menyatakan bahwa disabilitas merupakan kondisi dimana individu yang dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan, yang meliputi fisik, mental, emosi, maupun sosial, sehingga dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan mengalami hambatan pada tingkah lakunya.

Kebutaan dapat karena berbagai sebab, misalnya disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi (menular), penyakit-penyakit sistematik umumnya, kekurangan makanan yang bergizi,

kera- cunan, terluka, faktor keturunan, atau oleh penyakit-penyakit yang belum dikenal sebab-sebabnya.. Di tengah kemajuan ekonomi bangsa, tingginya standar kehidupan, pembudidayaan pelayanan kesehatan, latihan-latihan personal, sanitasi lingkungan yang cukup memadai, semua itu mengurangi penyebab kebutaan di mana-mana.